

BAB I

PENDAHULUAN

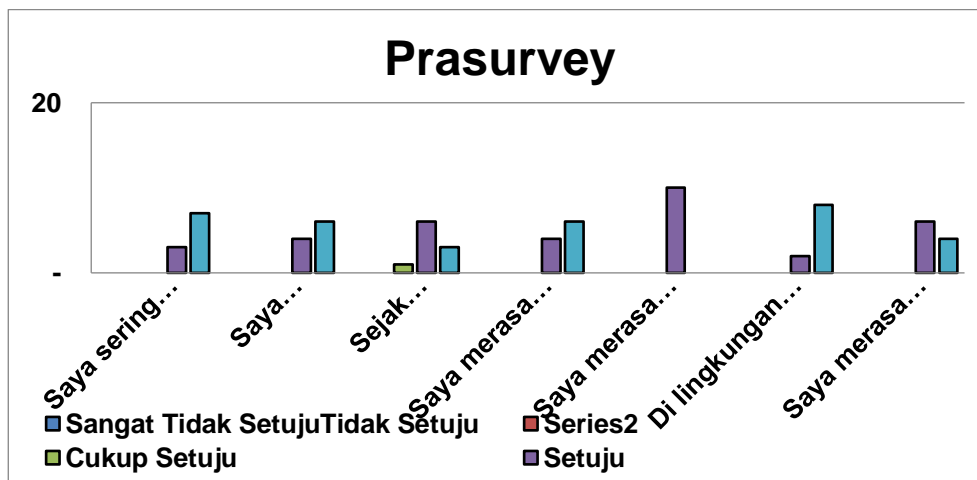
1.1 Latar Belakang

Inklusi keuangan merupakan pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Ugwuanyi & Amah Okore, 2022). Istilah inklusi keuangan menjadi tren pascakrisis 2008, terutama didasari dampak krisis kepada kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju (BANK INDONESIA, 2020). Institusi keuangan memegang peranan sentral melalui fungsi intermediasinya, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kendati demikian, fenomena perkembangan pesat dalam industri keuangan secara global dan domestik tidak secara otomatis menjamin terwujudnya akses keuangan yang memadai dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi kesenjangan antara kemajuan sektor keuangan dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan keuangan secara optimal, sehingga menimbulkan pertanyaan penting mengenai efektivitas pertumbuhan industri keuangan dalam mewujudkan inklusi keuangan yang sesungguhnya.

Berdasarkan data ojk indeks inklusi keuangan secara nasional mengalami penurunan yang signifikan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 85,10% (Ojk, 2022), namun angka ini mengalami penurunan menjadi 75,02% pada tahun 2024 (Ojk, 2024). Penurunan sebesar hampir sepuluh persen dalam indeks inklusi keuangan ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya memperluas akses dan penggunaan layanan keuangan di kalangan masyarakat. aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol yang merugikan (CNN, 2024), penurunan daya beli akibat penurunan pendapatan (Suara.com, 2024),

keterbatasan akses bagi kelompok rentan dan usia non-produktif, serta kendala infrastruktur di daerah terpencil merupakan faktor yang memiliki kemungkinan mengakibatkan adanya penurunan indeks inklusi keuangan . Di Lampung sendiri , potensi penurunan indeks inklusi keuangan kemungkinan besar dipengaruhi oleh dua kelompok utama yaitu peningkatan aktivitas keuangan ilegal, terutama pinjaman online (pinjol) ilegal yang dapat menjerat masyarakat dan menurunkan kepercayaan pada sistem keuangan formal (Lampung, 2024a), serta penurunan pendapatan yang mengakibatkan berkurangnya daya beli masyarakat (Lampung, 2024b), sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia.

Menyikapi fenomena terjadinya penurunan indeks inklusi keuangan dan potensi pengaruh e wallet di kalangan generasi muda dilakukan prasurvey terhadap mahasiswa di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya



Grafik 1. 1 Prasurvey

Secara keseluruhan, hasil dari prasurvey ini mengindikasikan bahwa e-wallet (Shopeepay) sangat populer dan sering digunakan di kalangan mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, terutama karena insentif dan kemudahan. Namun, terdapat potensi dampak negative terhadap kontrol keuangan dan adanya pengaruh dari aspek emosional serta lingkungan sosial dalam pola konsumsi melalui e-wallet. Pembayaran e-wallet merupakan salah

satu bentuk layanan fintech yang paling populer di Indonesia, diikuti oleh investasi berbasis web dan layanan paylater. Hingga Februari 2020, 41 penyedia e-wallet berlisensi telah disetujui oleh regulator pemerintah Indonesia. 5 penyedia e-wallet teratas di Indonesia berdasarkan jumlah pengguna aktif bulanan adalah GoPay, OVO, Dana, LinkAja, dan ShopeePay (Shrier, 2022). ShopeePay adalah aplikasi dompet elektronik yang menawarkan platform yang nyaman bagi penggunanya untuk melakukan pembayaran dengan berbagai sumber dana. ShopeePay menyediakan akses mudah ke berbagai produk digital dan layanan keuangan. ShopeePay memiliki visi untuk mewujudkan dan mempercepat inklusi keuangan di Indonesia (Shopeepay, 2025). Meskipun e-wallet seperti ShopeePay memudahkan transaksi, kemudahan tersebut dapat menyebabkan keborosan dalam pengelolaan keuangan. parafrasekan menggunakan bahasa akademik yang baik dan benar

Layanan Keuangan Digital merupakan berbagai transaksi keuangan yang dilakukan melalui teknologi digital, baik menggunakan aplikasi mobile maupun situs web. Layanan ini melibatkan pihak ketiga, seperti agen, yang berfungsi sebagai perantara dalam proses transaksi keuangan yang diinginkan. Salah satu contoh layanan keuangan digital adalah bank digital, yang menyediakan layanan perbankan secara online tanpa memerlukan kehadiran fisik. Layanan keuangan digital mempermudah transaksi secara cepat, aman, dan efisien (Utama, 2022). Perbankan digital memungkinkan orang untuk membuka rekening bank dan mengakses berbagai layanan keuangan melalui platform online. Layanan ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan. Dengan perbankan digital, individu dapat dengan mudah melakukan transaksi keuangan tanpa harus mengunjungi cabang bank. Hal ini memperluas akses ke inklusi keuangan (Ketrina, 2023).

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek yang diteliti adalah Inklusi Keuangan

1.2.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek yang diteliti adalah mahasiswa IIB Darmajaya

1.2.3 Ruang Lingkup Tempat

Ruang lingkup tempat dalam penelitian ini adalah Kampus IIB Darmajaya

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Apakah e-wallet berpengaruh terhadap inklusi keuangan?

1.3.2 Apakah layanan keuangan digital berpengaruh terhadap inklusi keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui pengaruh e-wallet terhadap inklusi keuangan

1.4.2 Untuk mengetahui pengaruh layanan keuangan digital terhadap inklusi keuangan